



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2020

Penyusun:

Penanggung Jawab: Bakhtaruddin | Ketua Tim: Halim | Anggota:
Sugeng Hermanto, Setyarta, Arie Suwandani W. W., Sudarmaji,
Hasan Fauzi, Sugino, M. Prasetyo W., Heti Liyana E., Royhul Akbar,
Suyono, Syarifah Fauziah, Syafruddin, Rini Apriani, Ilham Dewa S.

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	10
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah.....	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020.....	16
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	17
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	17
B. Pendapatan Konsolidasian	17
C. Belanja Konsolidasian	19
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	20
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	22
A. Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	22
B. Peran Dana Desa dalam Penanganan Covid-19	24

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pada triwulan I tahun 2020 ekonomi Riau tumbuh 2,24%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,89%, dan berada di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau, maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar 0,76%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2020 meningkat sebesar 0,50% poin menjadi sebesar 5,07% dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 5,57%. Tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 6,9% masih lebih tinggi dari target RKPD sebesar 6,75%, dan namun berada di bawah RKP sebesar yang 8,5%.

Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Triwulan I 2020 beserta Target dalam RKPD dan RKP

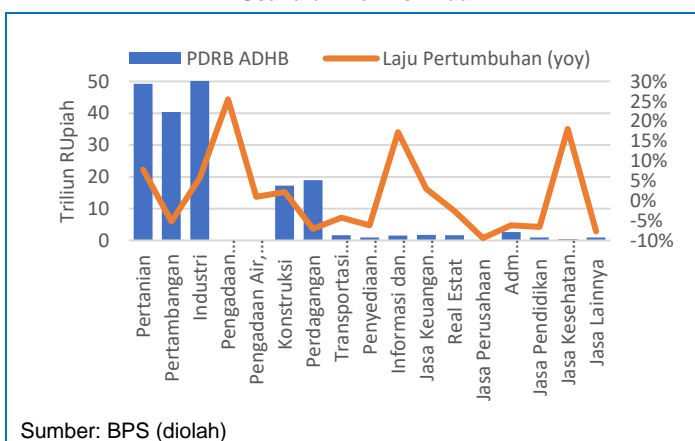
Indikator Ekonomi	TW I	RKPD	RKP
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	2,24	2,81	5,3
Tingkat Inflasi (tahun kalender)	0,76	2,37	3,1
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,07	6,02	4,8
Tingkat Kemiskinan	6,9	6,75	8,5

Sumber: BPS Provinsi Riau, Bappenas, Bappeda Provinsi Riau

A. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Riau triwulan I 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp190,96 triliun. Angka ini merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 4,72% terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I 2020 mencapai 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,89%, dan masih berada di bawah target RKPD Riau tahun 2020 sebesar 2,81% dan RKP sebesar 5,3%.

Grafik 1.1 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau

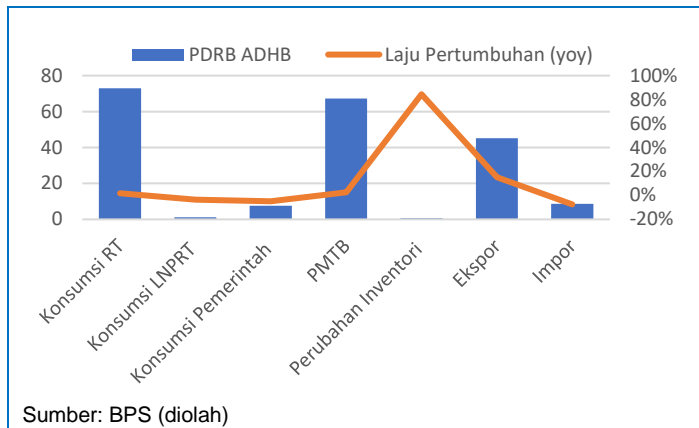


Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian lapangan usaha, namun sebagian lapangan usaha yang lain mengalami kontraksi pertumbuhan. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,50%, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,03%, dan Informasi

dan Komunikasi sebesar 17,26%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen-komponen yang berkontribusi besar terhadap PDRB Riau. Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,19%, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto

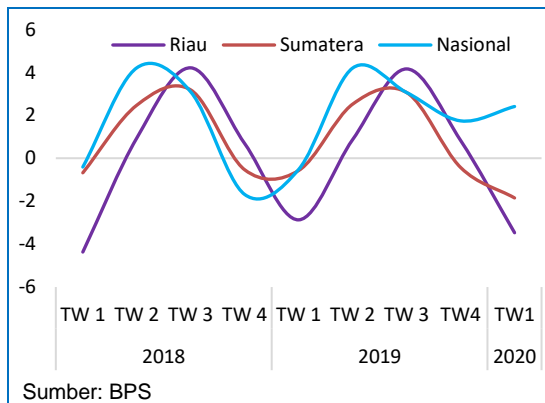
Grafik 1.2 PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Riau dari Sisi Pengeluaran di



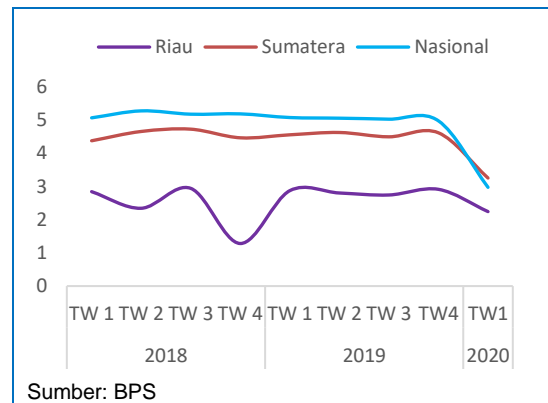
(PMTB) sebesar 2,71%, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,72%. Struktur ekonomi Provinsi Riau triwulan I-2020 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (38,22%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (35,17%) dan Ekspor Barang dan Jasa (23,64%).

Adapun ekonomi Provinsi Riau triwulan I 2020 terhadap triwulan IV 2019 (qtq) mengalami kontraksi sebesar 3,47%. Penurunan ini terjadi karena hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan akibat adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,48%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,56%; Informasi dan Komunikasi sebesar 2,85%; dan Pertambangan dan Pengalihan sebesar 1,82%.

Grafik 1.3 Perkembangan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional (q-to-q)



Grafik 1.4 Perkembangan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional (y-on-y)



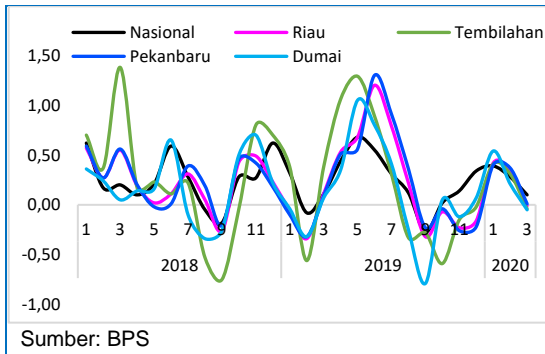
B. Inflasi

Pada bulan Maret 2020, Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,01%(mtm), sementara itu di tingkat nasional mengalami inflasi sebesar 0,10 persen. Inflasi *year on year* Riau sebesar 2,01%, sedangkan inflasi tahun kalender Riau telah mencapai 0,76%, masih berada di bawah target RKP sebesar 2,37% dan RKP sebesar 3,1%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada 3 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,30%, dan kelompok transportasi sebesar -0,27%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,02%.

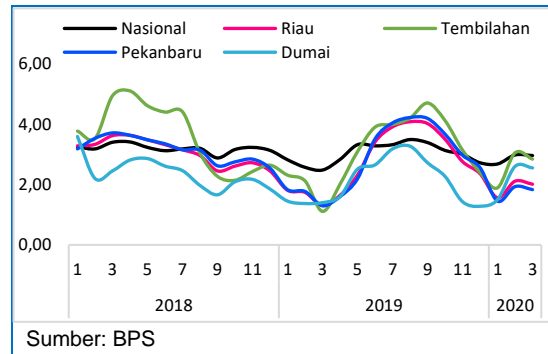
Sejak wabah corona mencapai Riau pada Maret 2020, warga dan pemerintah mulai mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan lebih banyak berada di dalam

rumah. Hal tersebut membuat belanja masyarakat menurun, bandara dan pusat perbelanjaan sepi, restoran dan kafe banyak yang tutup sedangkan persediaan barang lebih banyak.

Grafik 1.5 Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau dan Nasional (mtm)



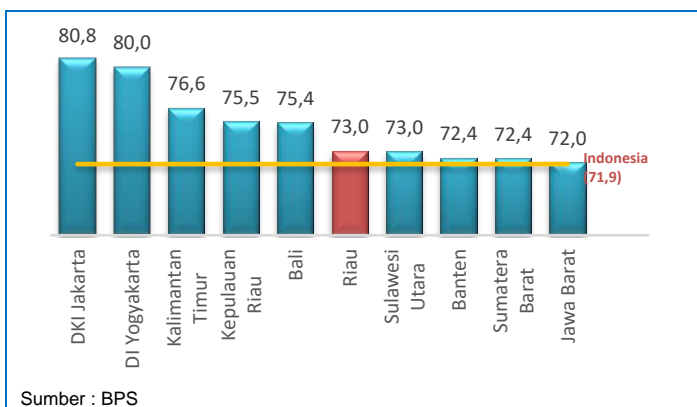
Grafik 1.6 Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)



C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, jumlah angkatan kerja, dan tingkat pengangguran.

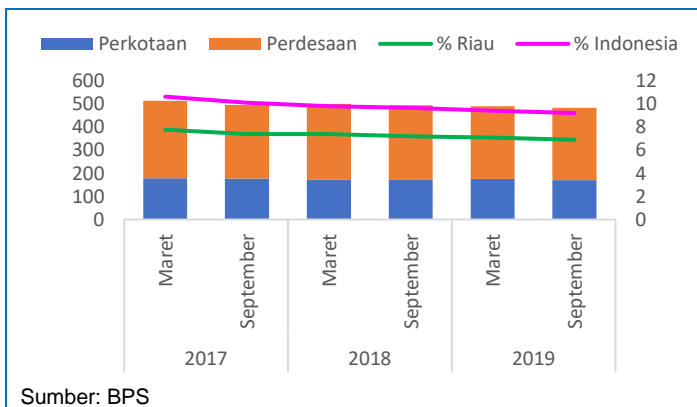
Grafik 1.7 Perkembangan IPM di Provinsi Riau



Angka IPM menggambarkan secara komprehensif tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak kegiatan pembangunan yang dilakukan suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM, pencapaian pembangunan manusia semakin baik. IPM Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 73 meningkat 0,56

point dari tahun sebelumnya sebesar 72,44. IPM Riau tahun 2019 secara nasional berada di peringkat keenam dan berada di atas IPM nasional yang berada pada level 71,92. Sementara di tingkat regional Sumatera, IPM Riau menduduki peringkat kedua setelah Kepulauan Riau yang mencapai 75,48.

Grafik 1.8 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau

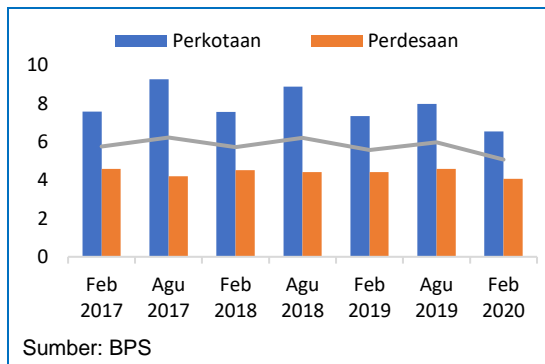


Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bulan September 2019 sebanyak 483,92 ribu jiwa atau sebesar 6,9% dari total penduduk Provinsi Riau yang tersebar di Perkotaan (6%) dan Pedesaan (7,51%). Jika dibandingkan periode September 2018 yang berjumlah 490,72 ribu jiwa atau 7,21%, terjadi penurunan

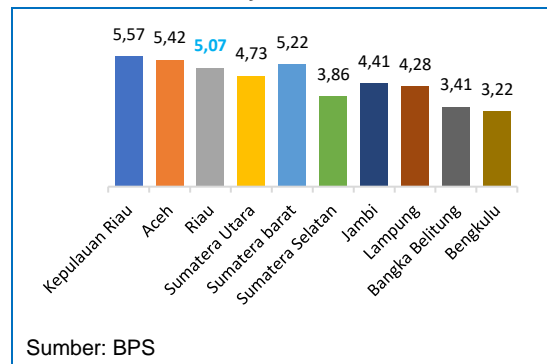
sebanyak 0,31%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional yang menurun dari 9,66% pada September 2018 menjadi 9,22% pada September 2019. Tingkat kemiskinan tersebut telah berada di bawah target RKPD Riau tahun 2020 sebesar 6,75% dan RKP sebesar 8,5%.

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 3,33 juta orang, bertambah 31,24 ribu orang dibanding Februari 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 3,16 juta orang, bertambah 46,25 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2020 sebanyak 5,07%, turun sebesar 0,50% poin dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,57%, dan berada di bawah target RKPD sebesar 6.02%. Adapun TPT di perkotaan sebesar 6,54%, turun sebesar 0,80% poin dari tahun sebelumnya dan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 4,07%, yang turun sebesar 0,34% poin dari tahun sebelumnya.

Grafik 1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau 2017-2020



Grafik 1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Sumatera



II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2020 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp19,83 triliun dan pagu belanja sebesar Rp29,09 triliun. Target pendapatan tahun ini lebih dibanding tahun sebelumnya sedangkan pagu belanja lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020
(dalam miliar Rp)**

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	18.432	2.656	14.4%	19.838	3.182	16.03%
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	18.432	2.656	14.4%	19.838	3.182	16.03%
1. Penerimaan Perpajakan	17.816	2.390	13.41%	18.922	2.918	15.42%
2. PNBP	616	266	43.2%	916	264	28.8%
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	34.969	6.994	20.0%	29.094	6.417	22.1%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	8.000	1.233	15.4%	8.067	1.146	14.2%
1. Belanja Pegawai	2.746	563	20.5%	3.133	591	18.9%
2. Belanja Barang	3.458	500	14.5%	3.365	473	14.1%
3. Belanja Modal	1.775	170	9.6%	1.546	82	5.3%
4. Belanja Bantuan Sosial	21	1	4.8%	22	-	-
II. TKDD	26.969	5.761	21.4%	21.027	5.271	25.1%
1. Transfer ke Daerah	25.532	5.686	22.3%	19.574	5.119	26.2%
a. Dana Perimbangan	25.287	5.588	22.1%	19.190	5.119	26.7%
1) Dana Bagi Hasil	10.982	2.106	19.2%	6.105	1.600	26.2%
2) Dana Alokasi Umum	8.991	2.963	33.0%	8.486	2.960	34.9%
3) Dana Alokasi Khusus	5.314	519	9.8%	4.599	559	12.2%
b. Dana Insentif Daerah	245	98	40.0%	384	-	-
2. Dana Desa	1.437	75	5.2%	1.453	152	10.5%
C. SURPLUS (DEFISIT)	-30.729	-4.338	14.1%	-25.049	-3.235	12.9%

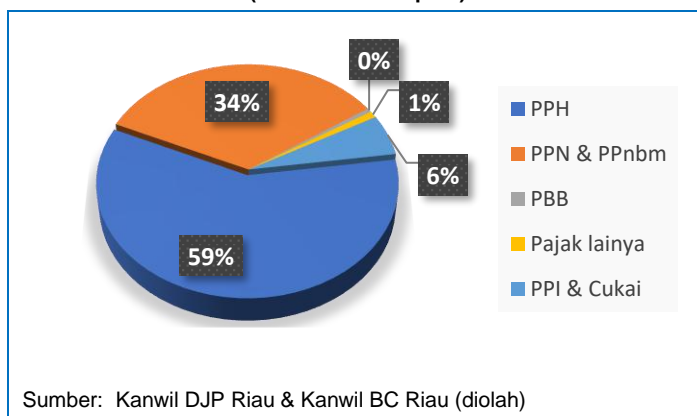
Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak), Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)

Realisasi pendapatan negara di Riau sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp 3,18 triliun, tumbuh 19% bandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja negara mengalami penurunan 8% menjadi Rp6,41 triliun.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

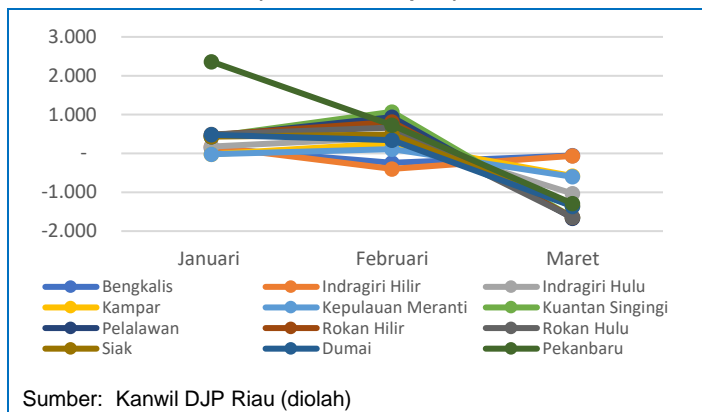
**Grafik 2.1 Proporsi Penerimaan Perpajakan di Riau
(dalam miliar Rupiah)**



Sampai dengan akhir triwulan I 2020, penerimaan perpajakan di Riau dapat terealisasi dengan jumlah neto sebesar Rp2,92 triliun, mengalami kenaikan dibanding periode yang sama di tahun lalu yang hanya mencapai Rp2,39 triliun. Penerimaan yang dicapai pada Triwulan I T.A 2020 tersebut terdiri dari penerimaan PPh sebesar 1,72 triliun, PPN sebesar

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Grafik 2.4 Penerimaan PPnBM Per Kabupaten/Kota (dalam Juta Rupiah)

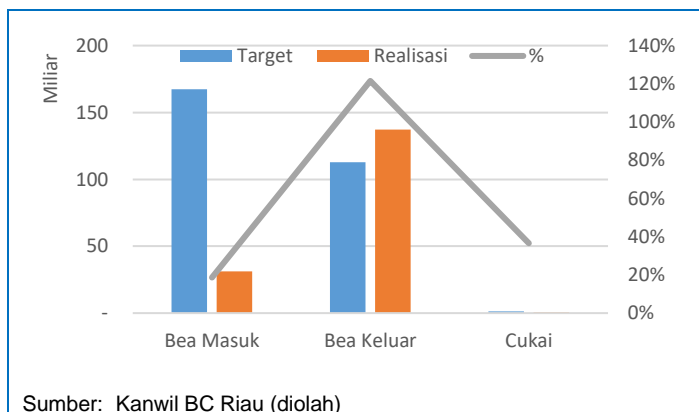


Penerimaan PPnBM triwulan I 2020 sebesar Rp 1,79 miliar, meningkat Rp 1,09 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 0,7 miliar. Penerimaan PPnBM tertinggi di Kota Pekanbaru sebesar Rp 2,34 miliar. Sedangkan penerimaan PPnBM terendah berada pada Kab. Siak yaitu sebesar Rp 53,1 Juta. Hal ini

mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru memiliki daya beli yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Riau.

d. Penerimaan Bea dan Cukai

Grafik 2.5 Penerimaan Bea dan Cukai



Penerimaan bea dan cukai dan terealisasi sebesar Rp168,80 miliar atau 59,94% dari target tahun 2020. Realisasi penerimaan Bea Cukai terdiri dari Bea Masuk Rp31,19 miliar (18,63%), Bea Keluar Rp137,09 miliar (121,52%), dan Penerimaan Cukai Rp516,57 juta (36,64%).

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP berjumlah Rp 264,19 miliar, berkontribusi 8.3% terhadap total pendapatan, menurun dibandingkan triwulan I Tahun 2019 yang mencapai Rp 266,34 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp 121,66 miliar dan pendapatan BLU Rp 142,53 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan Administrasi dan penegakan hukum sebesar Rp53,72 miliar, Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha sebesar Rp 2,68 miliar, Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan sebesar Rp 6, 13 miliar, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp 8,17 miliar, Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 32,71 miliar, Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp 157 Juta, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp 1,79 miliar, Pendapatan denda sebesar Rp 284,3 Juta dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp 15,97 miliar.

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan I T.A 2020 belum terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah di Provinsi Riau.

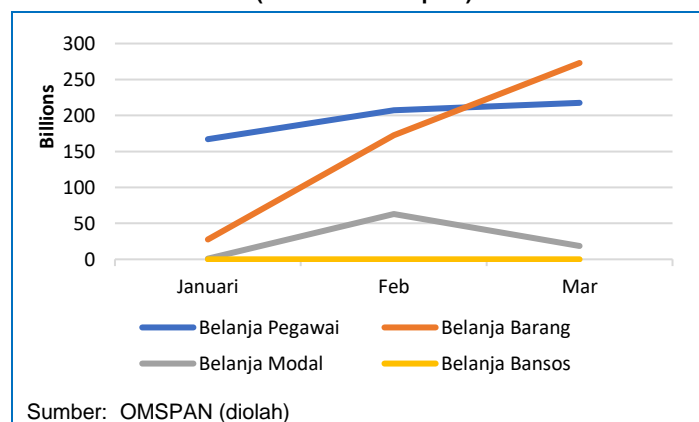
B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

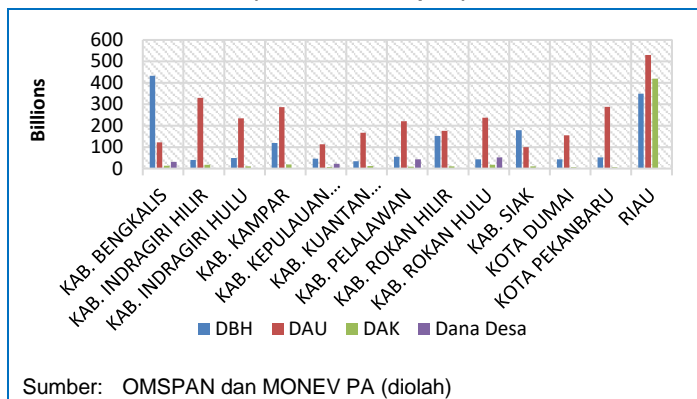
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan I tahun 2020 tercatat Rp1,14 triliun atau 14,15% dari pagu belanja yang berjumlah total Rp 8,10 triliun. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya isu terkait wabah Covid 19 yang sempat menghambat pengeluaran negara di Triwulan I ini. Karena dengan adanya wabah Covid 19 kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, rapat, pertemuan dinas tidak dapat dilakukan sehingga anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan saat ini. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Per Triwulan I T.A 2020 ini realisasi belanja pegawai tidak mengalami gangguan dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 591.67 miliar (51.56%), belanja barang Rp 473,08 miliar (41.23%), belanja modal Rp82,6miliar (7.2%), untuk belanja bantuan sosial belum ada realisasi sampai akhir Triwulan I Tahun 2020. Namun ada indikasi bahwa realisasi Belanja Bantuan Sosial akan mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya, hal ini dikarenakan adanya program peningkatan Belanja Bansos untuk pembayaran PBI JKN dan percepatan penyaluran bantuan sembako sebagai akibat dari mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Maret 2020 senilai Rp509,1 miliar. Lebih besar Rp 66,59 miliar dibanding bulan Februari Tahun 2020. Realisasi pada Triwulan I Tahun 2020 tidak terlalu memiliki slope kenaikan atau penurunan yang tajam kecuali gap antara realisasi pada bulan Januari dengan Februari ataupun Maret 2020.

**Grafik 2.6 Belanja Pemerintah Pusat
(dalam miliar Rupiah)**



2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**Grafik 2.7 Realisasi TKDD s.d. Triwulan I 2020
(dalam miliar Rupiah)**



Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau adalah sebesar Rp 25,2 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 26,9 triliun. Hal ini disebabkan karena alokasi DBH yang mengalami penurunan karena dalam Asumsi Makro APBN 2020 lifting migas

dan harga minyak mengalami penurunan dibanding asumsi makro tahun 2019. Di samping itu pada tahun 2020 terdapat kebijakan pengendalian alokasi DBH, di mana alokasi DBH dalam perpres merupakan angka terkecil hasil perbandingan dari proyeksi rencana penerimaan DBH tahun 2020 dengan rata-rata realisasi DBH 5 tahun terakhir. Alasan lainnya disebabkan oleh adanya penyesuaian yang dilakukan pemerintah pusat untuk memangkas anggaran TKDD dikarenakan proyeksi akan menurunnya pendapatan negara yang diperkirakan turun hingga 10 %. Untuk realisasi TKDD sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp 4,07 triliun atau 16,15 % dari total pagu. Jumlah ini mengalami penurunan realisasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,76 triliun. Meskipun demikian diharapkan penyerapan belanja pada bulan-bulan berikutnya akan mengalami peningkatan dengan adanya program percepatan realisasi DAK Fisik pada bidang pendidikan dan kesehatan. Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2,96 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,6 triliun, dan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 559.23 miliar serta Dana Desa sebesar Rp 152,1 miliar.

3. Pengelolaan BLU

Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp 369,06 miliar. Menurun 13,29 % dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar 425,64 miliar Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi belanja sumber dana BLU sebesar Rp35,79 miliar. Bila dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama di tahun lalu baik pagu dan realisasi sama-sama mengalami penurunan. Untuk Realisasi mengalami penurunan sebesar 35,1 % dibanding tahun lalu.

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020

Satker BLU	2019				2020			
	RM		BLU		RM		BLU	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Universitas Riau	212.777	37.921	250.050	44.818	238.295	39.206	231.381	7.239
UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	149.509	17.759	111.088	6.762	139.248	20.834	119.576	24.495
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5.016	812	18.452	3.569	4.537	800	18.103	4.054
TOTAL	367.301	56.491	425,640	55.149	382.080	60.840	369.060	35.788

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan BUMD. Sampai dengan triwulan I 2020 piutang negara yang berstatus belum menyelesaikan administrasi pinjaman dan masih diwajibkan melakukan rekonsiliasi pinjaman tersebar di empat debitur, yaitu Pemprov Riau, Pemkab Kampar, Pemkab Indragiri Hulu dan PDAM Indragiri Hilir. Dari empat debitur tersebut, terdapat satu debitur yang masih mempunyai hak tagih pemerintah sebesar 2,81 miliar Rupiah yaitu Pemprov Riau. Debitur tersebut saat ini sedang dalam proses restrukturisasi pinjaman melalui mekanisme *debt swap*. Sementara itu debitur lainnya sudah tidak memiliki kewajiban (pinjaman lunas), namun tetap harus melakukan rekonsiliasi dikarenakan belum dilakukan proses penutupan pinjaman.

Tabel 2.3 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2020 (dalam juta rupiah)

No.	Nama Debitur	No. Pinjaman	Hak Tagih Pemerintah	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Pemprov. Riau	RPD-329/Eks-RDA-259/DSMI/2009	Semula : 14.328.031.497,26 Dihapus : <u>3.516.775.910,50</u> Sisa 10.811.255.586,76 <u>7.998.726.347,00</u> 2.812.529.239,76	- <i>Debt Swap</i> -sesuai kriteria	Telah diverifikasi oleh Tim pada tanggal 10 s.d 14 Desember 2019 (menunggu persetujuan presiden untuk dilakukan penghapusan)
2	Pemkab. Inhu	RDA-199/P3/1999		Proses penutupan pinjaman	Telah selesai dengan terbitnya KMK penghapusan mutlak Nomor 780/KMK.05/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (sat ini menunggu penutupan perjanjian)
3	Pemkab. Kampar	SLA-621/DDI/1999		Proses penutupan pinjaman	Belum mengirim SPTJM dan laporan
4	PDAM Kab. Inhil	SLA-1066/DP3/1998		Proses penutupan pinjaman	Belum mengirim SPTJM dan laporan / laporan belum diterima Dit. SMI

Sumber: *Subsidiary Loan Information System (SLIM)*

Berdasarkan hasil verifikasi tim Direktorat SMI, pada tanggal 10 -14 Desember 2019, Pemprov Riau dinyatakan telah memenuhi kriteria *debt swap* sesuai PMK 176/PMK.05/2016, namun masih menunggu persetujuan presiden untuk dilakukan penghapusan. Sedangkan Pemprov Indragiri Hulu pada tahun ini telah dinyatakan selesai hutangnya berdasarkan *KMK penghapusan mutlak Nomor 780/KMK.05/2019 tanggal 10 Oktober 2019* dan saat ini statusnya sedang menunggu proses penutupan pinjaman. Sementara itu Pemda Kampar dan PDAM Indragiri Hilir masih dalam proses penghapusan.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan negara dan belanja negara yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2020 di lingkup Provinsi Riau menggunakan analisis forecasting dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Perkiraan pendapatan negara mempertimbangkan perkembangan perekonomian di dunia, maupun di Indonesia dan regional serta perkembangan tingkat inflasi terkini, sedangkan perkiraan belanja negara dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang

tengah dilaksanakan pemerintah, seperti program prioritas nasional pemerintah dan gerakan efisiensi belanja. Berdasarkan perhitungan dari realisasi pendapatan di tahun sebelumnya di mana tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3 % pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp 16,75 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 sebesar Rp16,31 triliun. Sementara itu, belanja negara diprediksi terealisasi Rp36,45 triliun berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp33,32 triliun. Hal tersebut mempertimbangkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya yang memiliki peningkatan rata-rata 10,5 % per tahunnya. Terdapat beberapa hal lain yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi belanja, di antaranya: 1) Perkiraan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapannya 2) potensi tidak salur DAK Fisik, Dana Kelurahan, dan Dana Insentif Daerah yang sudah dapat diperkirakan 3) Perubahan besaran pagu Dana Transfer ke Daerah Berdasarkan PMK No.35 Tahun 2020 4) Pengeluaran tak terduga dikarenakan wabah Covid-19.

**Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
s.d. Triwulan IV Tahun 2020**

Uraian	Pagu (miliar)	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Pendapatan Negara	18.642	3.182	17%	16.750	90%
Belanja Negara	29.094	6.417	22%	27.453	94%
Surplus/Defisit	-10.452	-3.235	31%	-10.703	102%

Sumber: SPAN dan hasil prognosis

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Selain itu, APBD juga sangat berguna untuk mengetahui komposisi anggaran dan prioritas kegiatan suatu daerah.

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN	32,595.34	6,623.01	20.32	34,711.57	5,313.15	15.31
PAD	6,597.70	1,112.21	16.86	7,103.11	1,110.35	15.63
Pajak Daerah	4,741.69	871.85	18.39	5,063.09	851.46	16.82
Retribusi Daerah	322.97	32.58	10.09	300.29	29.22	9.73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	357.82	0.36	0.10	378.67	0.00	0.00
Lain-Lain PAD yang Sah	1,175.23	207.43	17.65	1,361.06	229.67	16.87
Pendapatan Transfer	25,808.27	5,492.03	21.28	26,777.77	4,197.92	15.68
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	22,846.08	5,271.18	23.07	23,648.92	4,171.18	17.64
Dana Bagi Hasil Pajak	4,825.56	555.17	12	3,936.09	702.47	18
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4,607.73	1,230.28	27	5,385.07	747.75	14
Dana Alokasi Umum	8,954.07	2,963.78	33.10	9,461.10	2,632.49	27.82
Dana Alokasi Khusus	4,458.71	521.95	11.71	4,866.66	88.48	1.82
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1,660.01	134.65	8.11	1,644.77	22.56	1.37
Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Dana Penyesuaian	1,436.69	105.47	7.34	1,499.61	22.56	1.50
Dana Insentif Daerah	223.33	29.18	13.06	145.16	0.00	0.00
Transfer Pemerintah Provinsi	1,209.45	57.93	4.79	1,289.64	4.17	0.32
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1,209.45	29.28	2.42	1,289.64	4.17	0.32
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	28.66		0.00	0.00	
Transfer Bantuan Keuangan	92.73	28.27	30.49	194.44	0.00	0.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	92.73	28.27	30.49	194.44	0.00	0.00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	189.36	18.77	9.91	830.69	4.88	0.59
Pendapatan Hibah	132.35	0.80	0.60	667.33	2.07	0.31
Pendapatan Dana Darurat	0.00	17.97		0.00	0.00	
Pendapatan Lainnya	57.01	0.00		163.36	2.81	
JUMLAH PENDAPATAN	32,595.34	6,623.01	20.32	34,711.57	5,313.15	15.31
BELANJA	28,411.20	2,905.42	10.23	30,554.75	2,645.46	8.66
Belanja Pegawai	11,112.91	1,648.67	14.84	11,386.05	1,586.39	13.93
Belanja Barang	9,049.32	857.52	9.48	10,244.20	841.69	8.22
Belanja Bunga	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Belanja Subsidi	32.53	3.50	10.76	59.05	7.36	12.47
Belanja Hibah	1,335.00	228.18	17.09	1,874.57	145.49	7.76
Belanja Bantuan Sosial	87.26	0.00		84.72	0.23	
Belanja Modal	6,656.67	167.55	2.52	6,810.82	64.30	0.94
Belanja Tidak Terduga	137.51	0.00		95.35	0.00	
TRANSFER	4,405.75	81.94	1.86	4,859.39	98.17	2.02
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1,486.06	58.58	3.94	1,599.92	0.00	0.00

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1,486.06	58.58	3.94	1,596.99	0.00	0.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00		2.93	0.00	
Transfer Bantuan Keuangan	2,919.68	23.37	0.80	3,259.48	98.17	3.01
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	630.12	23.37	3.71	345.95	58.09	16.79
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2,289.56	0.00		2,894.25	40.08	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00		19.28	0.00	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	32,816.94	2,987.37	9.10	35,414.14	2,743.63	7.75
SURPLUS/DEFISIT	-221.61	3,635.64		-702.58	2,569.52	

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau

Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar Rp34,71 triliun untuk target pendapatan, pagu belanja sebesar Rp30,55 triliun dan defisit sebesar Rp702,58 miliar. Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer, yaitu Rp26,78 triliun (77,14%), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi Rp25,81 triliun atau 79,186%. Selain itu, pagu belanja juga naik 7,54% dibanding tahun sebelumnya.

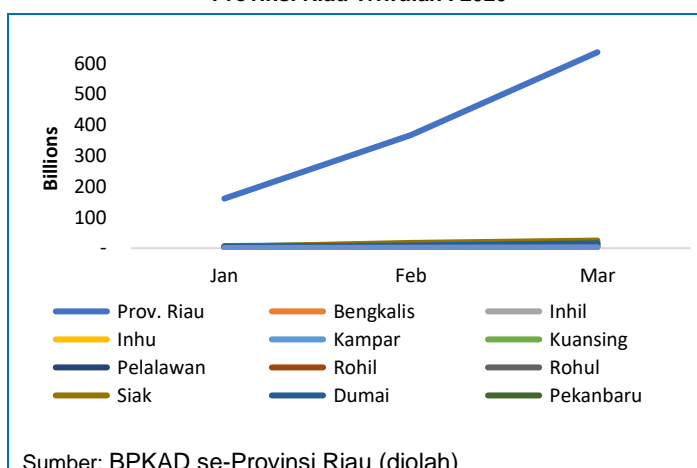
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp7,1 triliun yang berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp5,06 triliun atau 71,28%, retribusi daerah Rp300,29 miliar (4,23%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp378,67 miliar (5,33%), dan lain-lain PAD yang sah Rp1,36 triliun (19,16%). Total realisasi PAD sebesar Rp1,11 triliun atau 15,63% dari total target.

a. Penerimaan Pajak Daerah

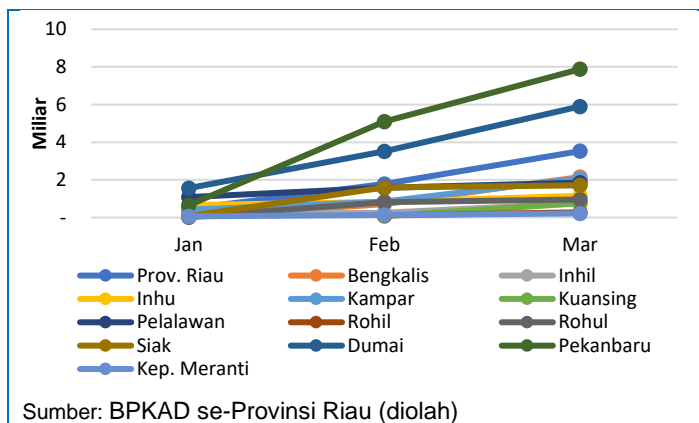
Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I 2020



Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp851,46 miliar atau 16,82% dari target, didominasi oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp636,49 miliar, 74,75% dari total penerimaan pajak daerah diikuti Kota Pekanbaru sebesar Rp90,87 miliar (10,67%). Secara bulanan pada bulan Januari realisasinya masih sangat kecil, kemudian mulai membaik pada bulan Februari dan Maret.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I 2020

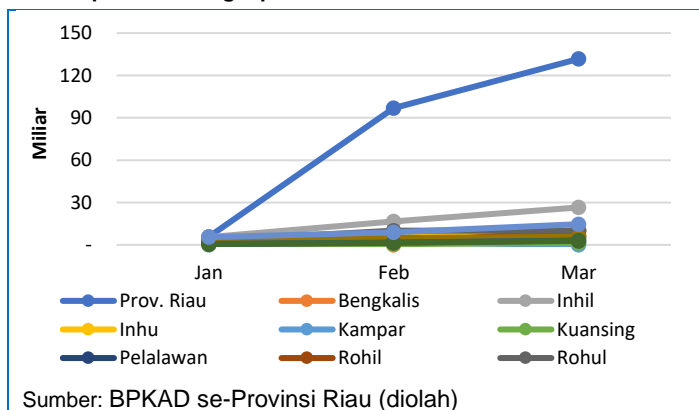


Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp29,22 miliar atau 9,73% dari target penerimaan. Penerimaan terbesar berada di Kota Pekanbaru sebesar Rp7,88 miliar (26,96%). Sedangkan penerimaan terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp214,97 juta (0,74%). Terkait dengan realisasi terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hulu

yaitu telah mencapai 24,68% dari pagu dan terkecil berada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 6,59% dari pagu.

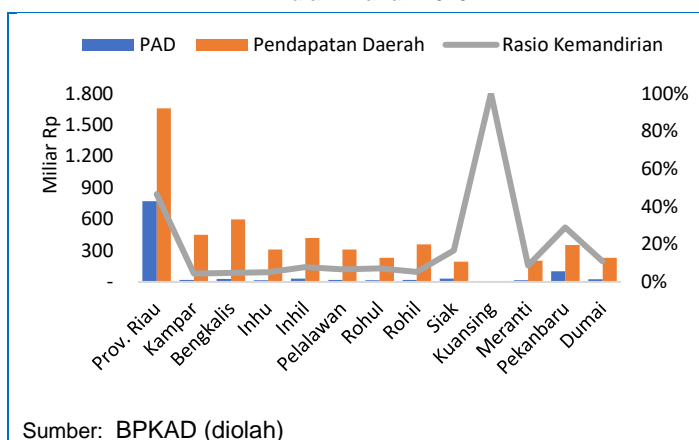
c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2020



Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi Rp229,67 miliar (16,87%), terbesar berada di Provinsi Riau sebesar Rp131,736 miliar atau 57,36%, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp26,52 miliar. Kabupaten Kampar belum terdapat realisasi penerimaan sampai dengan bulan Maret 2020.

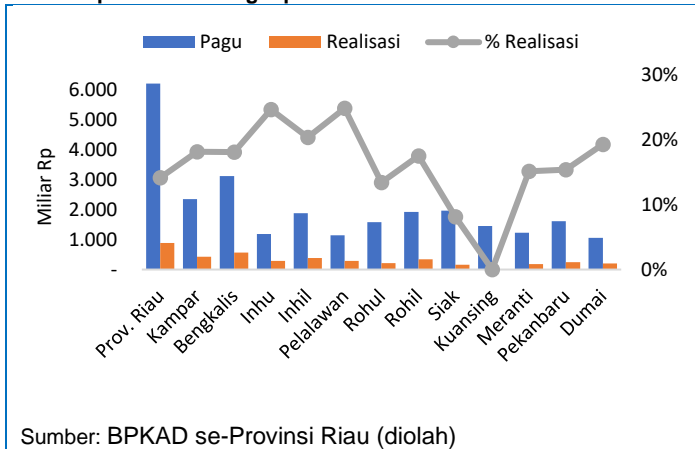
Grafik 3.4 Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2020



Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 20,90% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2. Pendapatan Transfer

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2020



Target pendapatan transfer se-Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp26,78 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp4,2 triliun (15,68%). Realisasi pendapatan transfer terbesar berada di Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp883,54 miliar atau 21,05% dari total realisasi pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp566,93 miliar (13,50%).

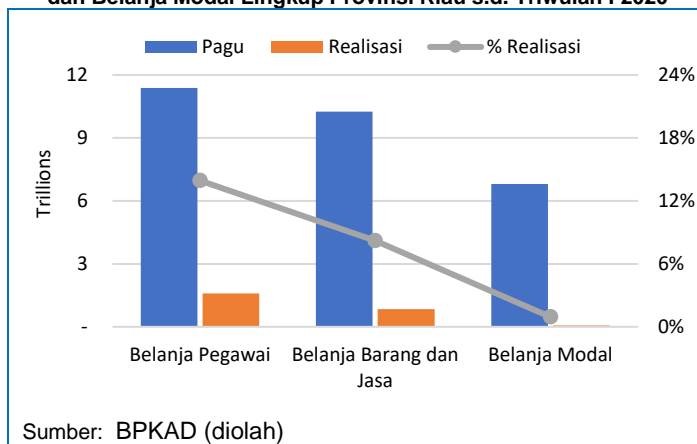
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp830,66 miliar, 2,39% dari total target pendapatan daerah. Target pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya. Realisasi pendapatan hibah sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp2,07 miliar atau hanya 0,31% dari target.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan I 2020

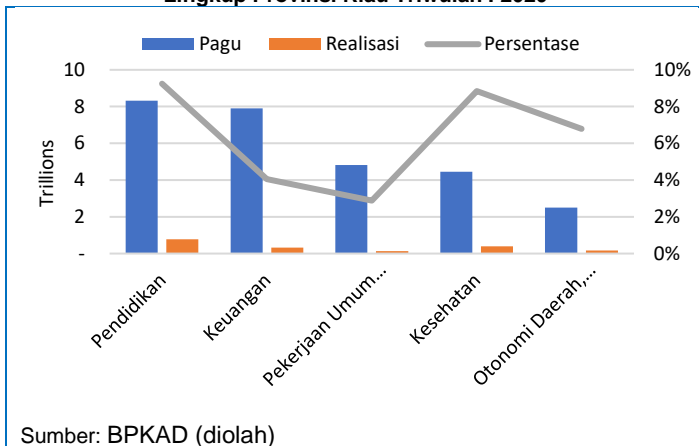


Belanja APBD terbesar adalah belanja pegawai dengan realisasi Rp1,59 triliun, 13,93% dari pagu belanja pegawai atau 59,97% dari total realisasi belanja, diikuti oleh belanja barang dengan realisasi Rp841,69 miliar (31,82% dari total realisasi belanja). Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi Rp64,3 miliar atau 2,43% dari total realisasi belanja.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pagu belanja daerah terbesar digunakan untuk urusan pendidikan, yaitu mencapai Rp8,32 triliun atau 27,23%. Hal ini berarti pemerintah daerah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan pendidikan di daerahnya. Selain itu, Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang mendapatkan porsi belanja tertinggi adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan kesehatan yang masing-masing mendapatkan porsi Rp4,82 triliun dan Rp4,46 triliun. Pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan kesehatan juga menjadi prioritas utama daerah dengan menyediakan sarana prasarana umum dan kesehatan untuk masyarakat.

Grafik 3.7 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan I 2020



Lima urusan dengan pagu terbesar adalah Pendidikan, Keuangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan dan Otonomi Daerah. Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai berikut: pendidikan sebesar Rp769,04 miliar (9,24%), Keuangan Rp320,43 miliar (4,05%), Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Rp139,01 miliar (2,88%), Kesehatan Rp394,47 miliar (8,85%), dan otonomi daerah Rp170,43 miliar (6,79%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp34,77 triliun atau 100,18% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp32,87 triliun atau 92,82% dari pagu belanja. Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
		Pendapatan Daerah	34,711.57	5,313.15	15.31
Belanja Daerah	35,414.14	2,743.63	7.75	32,872	92.82
Surplus/Defisit	(702.58)	2,569.52	(365.73)	1,902	(270.69)

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau
s.d. Triwulan I Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)**

Uraian	2020			Kenaikan	2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	3.087.746	5.484.006	4.165.834	788.164	3.377.670
Pendapatan Perpajakan	2.823.557	826.656	3.650.213	470.347	3.179.866
Pendapatan Bukan Pajak	264.189	254.240	515.621	(3.034)	518.655
Hibah	0	2.073	0	(798)	798
Transfer	0	4.401.037	0	321.649	(321.649)
Belanja Negara	6.423.731	2.727.471	4.745.284	726.984	4.018.300
Belanja Pemerintah	1.147.359	2.642.099	3.789.459	(195.861)	3.985.320
Transfer	5.276.371	85.372	955.825	922.845	32.980
Surplus/(Defisit)	(3.335.985)	2.756.535	(579.450)	61.179	(640.630)
Pembiayaan	0	693.030	693.030	180.204	512.826
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	693.030	693.030	180.204	512.826
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(3.335.985)	3.449.565	113.580	241.383	(127.803)

Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau

Catatan: Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah

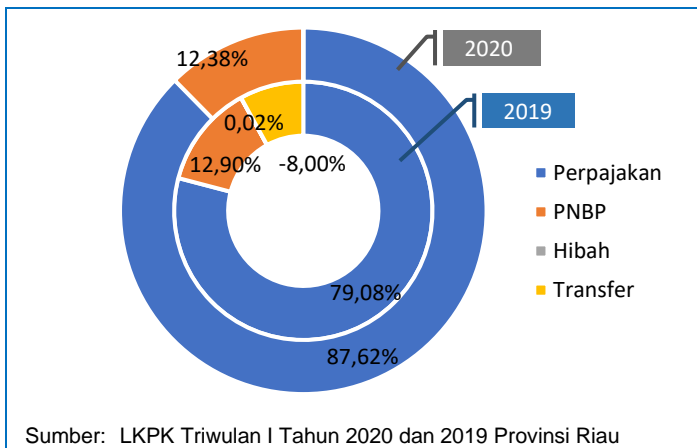
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan Triwulan I tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian, PNBK konsolidasian, pendapatan hibah konsolidasian, dan pendapatan transfer konsolidasian. Realisasi pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 23,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan perpajakan sebanyak 14,79%. Sementara penerimaan negara bukan pajak dan hibah justru mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,58% dan 100%.

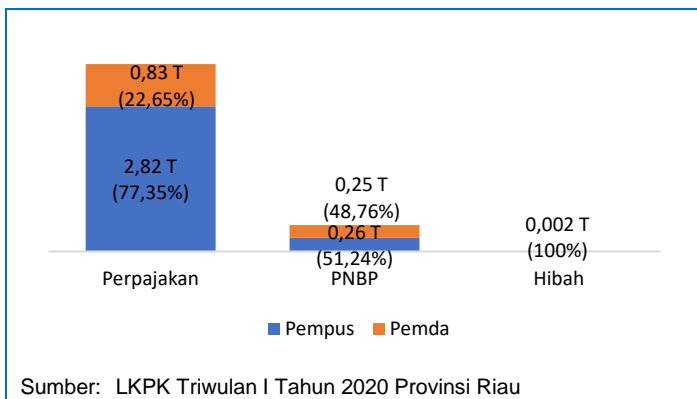
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2020 dan 2019



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau

disumbang oleh penerimaan perpajakan Pemerintah Pusat

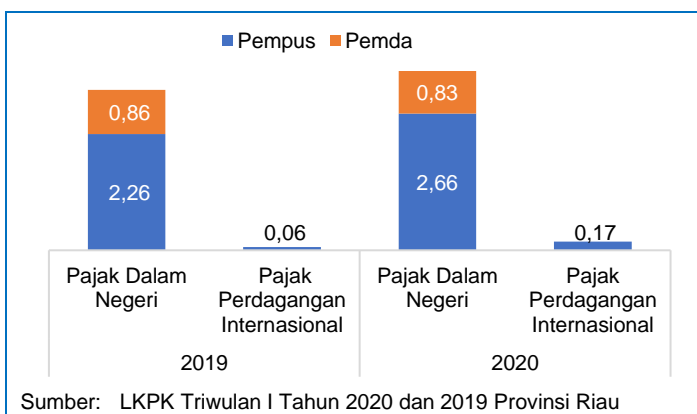
Grafik 4.2 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2020



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2020 Provinsi Riau

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pempus dan Pemda Triwulan I Tahun 2020 dan 2019



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau

pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan konsolidasian Triwulan I 2020 sebesar Rp4,17 triliun, sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp3,65 triliun, atau 87,62% dari total pendapatan, diikuti PNBP konsolidasian Rp0,52 triliun (12,38%).

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian sebagian besar yang mencapai Rp2,82 triliun atau 77,35% sementara penerimaan perpajakan pemerintah daerah memberikan kontribusi Rp0,83 triliun (22,65%). Dari sisi PNBP konsolidasian, PNBP Pemerintah Pusat sebesar Rp264,19 miliar (51,24%) dan PNBP pemda sebesar Rp254,24 miliar (48,76). Sementara pendapatan hibah seluruhnya berasal dari pemda yaitu sebesar Rp2,07 miliar.

Penerimaan perpajakan konsolidasian disumbang oleh penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp3,48 triliun (95,40%) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 76,26% dan sisanya 23,74% dari pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan pajak internasional menyumbang Rp167,94 miliar atau 4,60%, seluruhnya berasal dari

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Perpajakan	3.179,87	-4,22%	3.650,21	14,79%
PNBP	518,65	-23,45%	515,62	-0,58%
Hibah	0,80	3,91%	-	-100,00%
Total Pendapatan	3.699,32	-19,18%	4.165,83	12,61%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi	196.640,00	2,88%	190.960,00	2,24%

Sumber: BPS, LKPK Triwulan I Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)

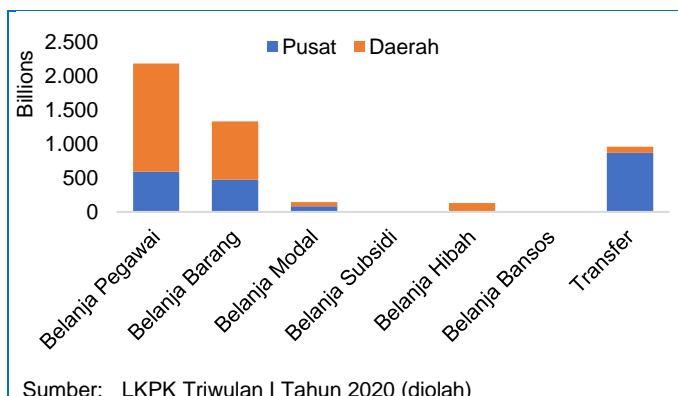
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Triwulan I tahun 2020 sebesar 2,24%. Pada periode yang sama, pendapatan gabungan yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp4,17 triliun atau naik 12,61%.

C. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau Triwulan I 2020



Realisasi belanja dan transfer konsolidasian Triwulan I tahun 2020 Provinsi Riau sebesar Rp4,75 triliun. Porsi terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 45,95%, diikuti oleh belanja barang sebesar 27,97%, sedangkan belanja modal mempunyai porsi 3,01%, kemudian transfer sebanyak 20,14%.

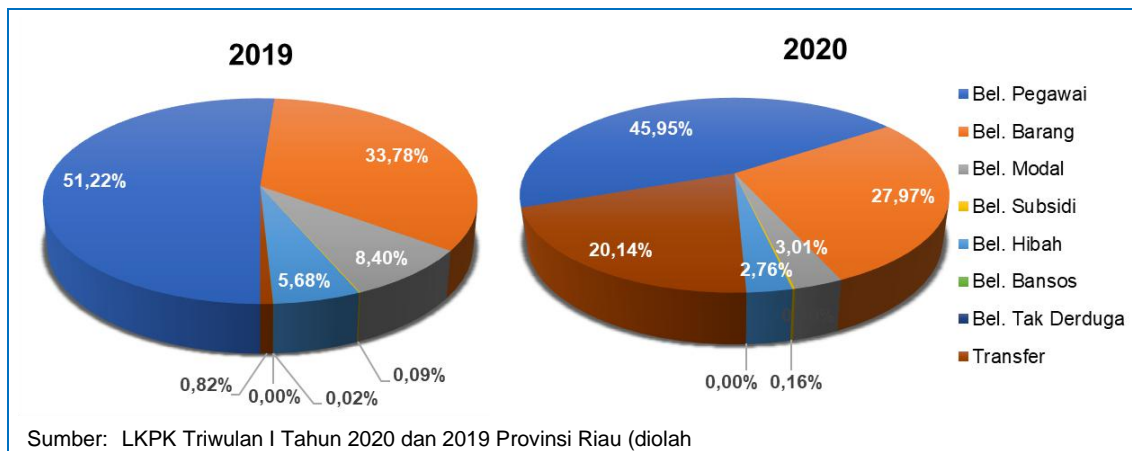
2. Analisis Perubahan

Realisasi belanja dan transfer konsolidasian triwulan I 2020 sebesar Rp3,79 triliun mengalami penurunan 4,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Jenis belanja yang mengalami penurunan di antaranya belanja modal turun 57,72%, belanja barang turun 2,19%, belanja hibah turun 42,58%, dan belanja bantuan sosial turun 76,90%. Sementara jenis belanja yang mengalami kenaikan di antaranya belanja pegawai naik 5,96%, belanja subsidi naik 110,41%, dan transfer naik 2.798,18%.

Komposisi belanja konsolidasian Triwulan I 2020 mengalami perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Pada tahun 2020 porsi belanja pegawai mengalami penurunan

dari 51,22% menjadi 45,95%, belanja barang turun menjadi 27,97 dari sebelumnya 33,78%, belanja modal mengalami penurunan dari 8,40% menjadi 3,01%.

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019 dan 2020



3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi perekonomian regional ke arah yang lebih baik. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian regional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.3 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

Indikator Ekonomi Regional	2019	2020
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	4.018,30	4.745,28
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,88	2,24
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	0,71	0,66
Tingkat Kemiskinan (%)	6,9	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,57	5,07
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,44	73,00

Sumber: LKPK Triwulan I 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat konsumsi pemerintah pada Triwulan I tahun 2020 turut mempengaruhi perlambatan perekonomian regional. Hal ini ditandai dengan turunnya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami perbaikan, ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah untuk kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, dan pengeluaran lainnya yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian.

**Tabel 4.4 Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah
Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2020**

Uraian	Jumlah
Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto	
Pendapatan:	10.669.678.406.013
Pajak	3.649.479.536.710
Kontribusi Sosial	-
Hibah	77.305.689.701
Pendapatan Lainnya	6.942.893.179.602
Beban:	4.682.684.223.048
Kompensasi Pegawai	2.212.090.171.159
Penggunaan Barang dan Jasa	1.266.643.263.359
Konsumsi Aset Tetap	-
Subsidi	7.364.194.000
Hibah	1.048.540.053.734
Manfaat Sosial	194.000.000
Beban Lainnya	147.852.540.797
Keseimbangan Operasi Bruto/neto	5.986.994.182.964
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	
Akuisisi Neto Aset Non Keuangan	142.713.567.277
Aset Tetap	110.554.315.820
Perubahan Persediaan	-
Aset Non Produksi	32.159.251.457
Net Lending/Borrowing	5.844.280.615.687
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
Akuisisi Neto Aset Keuangan	5.844.280.615.687
Dalam Negeri	5.844.280.615.687
Luar Negeri	-
Keterjadian Kewajiban Neto	-
Dalam Negeri	-
Luar Negeri	-

Sumber: LSKP Triwulan I 2020 Provinsi Riau

Konsumsi pemerintah pada Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1,27 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 0,66% dari PDRB Provinsi Riau sebesar Rp190,96 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah sebesar 0,66%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp143 miliar.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sejak kasus pertama diumumkan pasien positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia terus mengalami lonjakan. Dikutip dari laman resmi kemkes.go.id hingga tanggal 1 April 2020 jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.677 kasus. Demikian juga dengan wilayah Provinsi Riau jumlah terus mengalami peningkatan sehingga Gubernur Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat bencana nonalam akibat penyebaran virus corona (Covid-19) selama 30 hari mulai tanggal 17 Maret 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nomor Kpts.596/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020.

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Decimus menyatakan “Peluang pertumbuhan ekonomi Riau melebihi 3% pada 2020 kemungkinan akan tertutup. Merebaknya covid 19 diprediksi membuat perekonomian Riau di berbagai sektor limbung. Hadirnya bencana ini berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi Riau, karena permintaan global terhadap komoditas ekspor utama Riau mengalami koreksi. Covid-19 menyebabkan biaya dan loss setara 0,60 persen PDRB Riau. Loss terbesar diperkirakan terjadi di sektor industri pengolahan, disusul pertambangan, pertanian, transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Komoditas seperti CPO, karet, dan minyak bumi mengalami penurunan harga yang cukup tajam, yang juga menyumbang koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi Riau. Secara keseluruhan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Riau mengarah ke 2,32% sepanjang 2020. (Riau Pos, Kamis 16 April 2020 halaman 3)”.

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis antara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagai tindak lanjut atas Perppu nomor 1 tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang mengatur antara lain penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Tabel 5.1 Penyesuaian Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) TA 2020 Lingkup Provinsi Riau (Dalam Ribu Rupiah)

No.	Nama Pemda	Pagu Awal	Pagu Sesuai PMK 35/PMK.07/2020	Selisih	%
1	Provinsi Riau	401,011,751	256,771,909	144,239,842	35.97
2	Kab. Bengkalis	136,777,525	64,313,766	72,463,759	52.98
3	Kab. Indragiri Hilir	182,585,756	115,631,184	66,954,572	36.67
4	Kab. Indragiri hulu	117,896,135	55,820,196	62,075,939	52.65
5	Kab. Kampar	175,667,963	117,653,913	58,014,050	33.02
6	Kab. Kuantan Singingi	124,677,093	51,874,897	72,802,196	58.39
7	Kab. Pelalawan	101,499,503	62,317,621	39,181,882	38.60
8	Kab. Rokan Hilir	179,932,465	159,774,030	20,158,435	11.20
9	Kab. Rokan Hulu	153,835,149	79,590,460	74,244,689	48.26
10	Kab. Siak	180,216,901	121,838,199	58,378,702	32.39
11	Kota Dumai	150,544,061	120,580,227	29,963,834	19.90
12	Kota Pekanbaru	65,618,038	32,290,108	33,327,930	50.79
13	Kab. Kep. Meranti	181,890,333	153,669,687	28,220,646	15.52
Jumlah		2,152,152,673	1,392,126,197	760,026,476	35.31

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional.

Alokasi anggaran DAK Fisik lingkup Provinsi Riau mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp760,03 miliar atau 35,31%. Secara nominal penurunan alokasi DAK Fisik terbesar terdapat pada Pemerintah Provinsi Riau yaitu sebesar Rp144,24 miliar dan penurunan terkecil pada Kabupaten Meranti yaitu Rp.28.22 miliar. Secara persentase penurunan terbesar terdapat pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 58,39% dan penurunan terkecil pada Kabupaten Rokan Hilir 11,20%.

Tabel 5.2 Penyesuaian Alokasi Anggaran DBH, DAU, DID dan Dana Desa Lingkup Provinsi Riau TA 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Daerah	DBH		DAU	
		Pagu awal	PMK 35	Pagu awal	PMK 35
1	Provinsi Riau	1.810.407.702	1.368.993.056	1.603.291.532	1.439.451.620
2	Kab. Bengkalis	2.186.955.751	1.603.192.464	84.249.340	344.485.485
3	Kab. Indragiri Hilir	232.264.536	169.406.129	1.015.712.393	897.840.706
4	Kab. Indragiri hulu	272.880.379	195.509.808	712.232.363	640.211.130
5	Kab. Kampar	636.710.655	445.062.810	880.181.253	775.080.963
6	Kab. Kuantan Singingi	205.229.671	141.316.974	683.713.751	609.467.997
7	Kab. Pelalawan	332.935.045	242.605.344	674.286.101	602.962.236
8	Kab. Rokan Hilir	780.283.651	533.361.419	545.145.197	491.772.859
9	Kab. Rokan Hulu	247.918.774	172.644.094	720.739.205	651.346.142
10	Kab. Siak	934.348.377	678.177.856	409.094.713	365.851.291

No	Nama Daerah	DBH		DAU	
		Pagu awal	PMK 35	Pagu awal	PMK 35
11	Kota Dumai	225.941.458	163.273.751	485.272.966	437.822.618
12	Kota Pekanbaru	272.974.410	221.369.241	906.014.576	818.435.221
13	Kab. Kep. Meranti	245.248.124	170.843.321	458.301.702	411.574.919
Jumlah		8.384.098.533	6.105.756.267	9.478.235.092	8.486.303.187

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional

Penurunan alokasi anggaran terjadi pada seluruh unsur dana TKDD TA 2020 lingkup Provinsi Riau. Dana Bagi Hasil (DBH) turun Rp2,28 triliun yaitu semula sebesar Rp8,38 triliun menjadi Rp6,10 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp992 miliar yaitu semula Rp9.478 miliar menjadi Rp8.486 miliar.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan refocusing anggaran termasuk penyesuaian anggaran TKDD. Terjadinya pembatasan sosial juga menyebabkan sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan. Untuk itu Pemerintah Daerah hendaknya melakukan rasionalisasi APBD dengan menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan melakukan perubahan APBD.

B. Peran Dana Desa dalam Penanganan Covid-19

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dalam masa pandemi COVID-19 prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau jaring pengaman sosial di Desa.

Di antara kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 adalah melakukan penyesuaian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 termasuk penyesuaian anggaran Dana Desa, antara lain digunakan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19). Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran Dana Desa sebesar 35% dari Dana Desa untuk BLT

Desa tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi Batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Tabel 5.3 Potensi Pemberian BLT Desa per Kabupaten

No	Nama Pemda	Pagu Dana Desa	Alokasi Maksimal Dana Desa Untuk BLT Desa (35%)	Nilai BLT Desa per Keluarga Untuk 3 bulan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
1	Kab. Bengkalis	131.032.700	45.861.445	1.800	25.479
2	Kab. Indragiri Hilir	171.913.227	60.169.629	1.800	33.428
3	Kab. Indragiri hulu	158.258.239	55.390.384	1.800	30.772
4	Kab. Kampar	212.934.016	74.526.906	1.800	41.404
5	Kab. Kuantan Singingi	175.256.296	61.339.704	1.800	34.078
6	Kab. Pelalawan	106.307.280	37.207.548	1.800	20.671
7	Kab. Rokan Hilir	144.465.232	50.562.831	1.800	28.090
8	Kab. Rokan Hulu	143.249.015	50.137.155	1.800	27.854
9	Kab. Siak	114.400.614	40.040.215	1.800	22.245
10	Kab. Kep. Meranti	95.363.524	33.377.233	1.800	18.543
Jumlah		1.453.180.143	508.613.050		282.563

Apabila masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan Dana Desa untuk BLT Desa sebesar 35% dari Alokasi Dana Desa maka nilai bantuan langsung tunai yang dapat diberikan kepada masyarakat di Provinsi Riau adalah sebesar 508,61 miliar rupiah dan jumlah keluarga penerima manfaat adalah sebanyak 282.563 keluarga.

“Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indragiri Hilir menggesa sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Berdasarkan hasil verifikasi, 45,650 kepala keluarga (KK) calon penerima bantuan sosial yang dinyatakan lolos dan berhak menerima bantuan sosial dari total 54.365 kepala keluarga usulan. “Sebanyak 28.504 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Rokan Hilir (Rohil) akan menerima Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Rohil dr Junaidi Saleh MKEs (Riau Pos, Kamis 13 April 2020 halaman 14)”.

Sesuai data pada tabel 3 di atas Dana Desa dapat berperan memberikan BLT Desa untuk 33.428 KK atau 73% dari total kepala keluarga (KK) calon penerima bantuan sosial yang dinyatakan lolos dan berhak menerima bantuan sosial di Kabupaten Indragiri Hilir, dan memberikan bantuan dalam bentuk BLT Desa untuk 28.090 KPM atau 98,5% dari total KPM yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai pada Kabupaten Rokan Hilir.

Dana desa sangat berperan dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk BLT Desa. Pemerintah Desa Bersama Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkoordinasi dalam mendata calon keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT Desa agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.